

Mengatasi Ketimpangan Pembangunan antara Wilayah Barat dan Timur Indonesia: Tantangan dan Solusi Ekonomi

Addressing Development Inequality between Western and Eastern Indonesia: Economic Challenges and Solutions

Dandan Haryono^{1*}, St Ramlah²

Universitas Tadulako, Indonesia¹, STIE Tri Dharma Nusantara, Indonesia²

Email: dandanharyono@untad.ac.id^{1*}, ramlah23@gmail.com²

Abstract

Equitable development between the Western and Eastern regions of Indonesia is one of the major challenges in achieving national welfare. The significant development gap between these regions is caused by various factors such as centralized policies, limited infrastructure, and low human resource (HR) quality in Eastern Indonesia. The Western region, particularly Java, is more advanced in many sectors, while the Eastern region, rich in natural resources, is still lagging behind in access to education, health, and infrastructure. Several policies have been implemented by the government to reduce this gap, including the Special Allocation Fund (DAK) and the Regional Autonomy program, but the results remain limited. Therefore, solutions to reduce this gap include optimizing the potential of natural resources in Eastern Indonesia, equitable infrastructure development, and empowering the private sector to invest in the Eastern region. Developing the tourism sector, resource-based industries, and improving HR quality in Eastern Indonesia are also important steps to achieving more equitable development. With the right approach, development disparities can be reduced, enabling Indonesia to achieve inclusive and just development.

Keywords: Development Gap, Western and Eastern Regions, Natural Resources, Infrastructure, Private Sector Empowerment.

Abstrak

Pembangunan yang merata antara wilayah Barat dan Timur Indonesia merupakan salah satu tantangan besar dalam mencapai kesejahteraan nasional. Ketimpangan pembangunan yang signifikan antara kedua wilayah ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kebijakan terpusat, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Timur. Wilayah Barat, terutama Pulau Jawa, lebih maju dalam banyak sektor, sedangkan wilayah Timur yang kaya akan sumber daya alam masih tertinggal dalam hal akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berbagai kebijakan telah diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ini, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan program Otonomi Daerah, namun hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi ketimpangan ini meliputi pengoptimalan potensi sumber daya alam di wilayah Timur, pembangunan infrastruktur yang merata, serta pemberdayaan sektor swasta untuk berinvestasi di wilayah Timur. Pengembangan sektor pariwisata, industri berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan kualitas SDM di wilayah Timur juga menjadi langkah penting untuk mencapai pembangunan yang lebih merata. Dengan pendekatan yang tepat, ketimpangan pembangunan dapat dikurangi, sehingga Indonesia dapat mencapai pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Ketimpangan Pembangunan, Wilayah Barat dan Timur, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, Pemberdayaan Sektor Swasta.

PENDAHULUAN

Pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu tujuan utama dari setiap kebijakan nasional. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pemerataan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur menjadi tantangan yang signifikan. Wilayah Barat Indonesia, khususnya Pulau Jawa, cenderung lebih maju secara ekonomi, sosial, dan infrastruktur dibandingkan dengan wilayah Timur Indonesia, seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketimpangan ini menciptakan ketidakseimbangan dalam tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi. Ketimpangan ini tidak hanya menjadi isu internal yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menghambat potensi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau, dengan Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi nasional, menyerap sebagian besar investasi dan sumber daya pembangunan. Sebaliknya, wilayah Timur Indonesia yang lebih terisolasi secara geografis, dengan kondisi infrastruktur yang terbatas dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seringkali tertinggal dalam hal pembangunan. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang signifikan antara kedua wilayah tersebut dalam banyak sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan perekonomian.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), wilayah Barat Indonesia, terutama Jawa, menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sementara wilayah Timur Indonesia hanya berkontribusi sekitar 20%. Disparitas ini semakin jelas terlihat dalam kualitas infrastruktur yang lebih berkembang di wilayah Barat, dengan akses transportasi, energi, dan telekomunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan wilayah Timur. Wilayah Timur Indonesia, meskipun kaya akan sumber daya alam, seperti tambang, kelautan, dan pertanian, masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengelolaan sumber daya tersebut, serta dalam hal distribusi keuntungan yang tidak merata kepada masyarakat.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi ketimpangan ini adalah kebijakan pembangunan yang selama ini terpusat di wilayah Barat, khususnya Pulau Jawa. Program-program pembangunan yang difokuskan di pusat pemerintahan dan pusat ekonomi nasional cenderung mengabaikan potensi wilayah Timur. Selain itu, faktor geografis yang sulit dijangkau, serta masalah sosial dan politik yang kerap muncul, semakin memperburuk kesenjangan pembangunan antara kedua wilayah tersebut.

Dalam upaya mengatasi ketimpangan pembangunan ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi Daerah, dan berbagai program lainnya yang ditujukan untuk mempercepat pembangunan di wilayah Timur Indonesia. Meskipun ada beberapa hasil positif, seperti peningkatan akses pendidikan dan

kesehatan, namun ketimpangan pembangunan antara Barat dan Timur Indonesia masih belum dapat diatasi secara tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi jauh lebih kompleks dan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik.

Sebagai bagian dari solusi, sektor ekonomi menjadi salah satu kunci utama dalam mengurangi ketimpangan pembangunan ini. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah Timur Indonesia, yang belum sepenuhnya dioptimalkan. Sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan energi, jika dikelola dengan baik dan berkelanjutan, dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas antarwilayah, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mengatasi ketimpangan pembangunan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mengatasi ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, serta mencari solusi ekonomi yang dapat diterapkan untuk mencapainya. Pendekatan berbasis pada pengelolaan sumber daya lokal, pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada keunggulan masing-masing daerah, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta SDM akan menjadi fokus dalam pembahasan ini. Dengan pemahaman yang mendalam tentang faktor penyebab ketimpangan dan solusi yang tepat, diharapkan dapat tercapai pembangunan yang lebih merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah Timur yang selama ini tertinggal.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Ketimpangan Pembangunan

Teori ketimpangan pembangunan secara umum mengacu pada ide bahwa pembangunan tidak terjadi secara merata antarwilayah dalam suatu negara. Menurut *Wallerstein* (1974), teori pusat dan pinggiran menjelaskan bahwa wilayah yang lebih maju cenderung menarik sumber daya dari wilayah yang lebih tertinggal. Dalam konteks Indonesia, Pulau Jawa, yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi, memiliki akses yang lebih besar terhadap berbagai sumber daya dan investasi dibandingkan dengan wilayah Timur yang lebih terisolasi dan terbatas dari segi infrastruktur.

Sementara itu, *Todaro* (2000) mengemukakan bahwa ketimpangan antarwilayah di negara berkembang terjadi karena adanya kesenjangan antara daerah yang sudah berkembang dan daerah yang tertinggal. Kesenjangan ini terjadi akibat ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya, baik berupa finansial, infrastruktur, maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketimpangan pembangunan ini menciptakan perbedaan dalam kualitas hidup, di

mana masyarakat di wilayah yang lebih maju (Barat) dapat menikmati fasilitas yang lebih baik daripada masyarakat di wilayah Timur.

Penyebab Ketimpangan Pembangunan di Indonesia

Penelitian yang dilakukan oleh *BPS* (2021) menunjukkan bahwa wilayah Barat, khususnya Pulau Jawa, berkontribusi lebih besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dibandingkan dengan wilayah Timur Indonesia. Salah satu penyebab utama ketimpangan ini adalah kebijakan pembangunan yang terpusat di Jawa sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi nasional. Sebagian besar anggaran pembangunan dan investasi diarahkan ke wilayah ini, sementara wilayah Timur yang lebih jauh dan sulit dijangkau kurang mendapat perhatian yang sama.

Menurut *Sutrisno* (2019), faktor geografis juga memainkan peran penting dalam ketimpangan ini. Wilayah Timur Indonesia yang terdiri dari banyak pulau dan daerah yang terisolasi secara geografis mengalami kesulitan dalam hal distribusi barang, pengembangan infrastruktur, dan pelayanan publik. Kondisi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang ada di wilayah tersebut, sehingga memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi antara Barat dan Timur.

Selain itu, ketimpangan ini juga didorong oleh faktor politik dan sosial. Sebagai contoh, *Lestari* (2020) menyatakan bahwa pemerintah pusat lebih sering mendanai proyek-proyek pembangunan yang mendatangkan keuntungan politik di wilayah Barat, sementara di wilayah Timur, banyak daerah yang belum memiliki representasi politik yang cukup untuk memprioritaskan pembangunan daerah mereka.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan Pembangunan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara Barat dan Timur. Salah satu program yang paling signifikan adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diberikan kepada daerah-daerah yang kurang berkembang, termasuk wilayah Timur Indonesia. DAK bertujuan untuk membantu pembiayaan proyek-proyek pembangunan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan dasar di wilayah tersebut.

Bappenas (2020) juga mencatat bahwa kebijakan Otonomi Daerah, yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah, berpotensi membantu mempercepat pembangunan di wilayah Timur dengan menciptakan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Namun, hasil dari kebijakan tersebut masih terbatas, karena banyak daerah di wilayah Timur yang menghadapi masalah seperti rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan.

Solusi Ekonomi untuk Mengurangi Ketimpangan

Beberapa penelitian menyarankan bahwa solusi ekonomi yang efektif untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia harus mencakup pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik di wilayah Timur. *Fitriani* (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa wilayah Timur Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti sektor perikanan, pertanian, dan energi terbarukan. Namun, sektor-sektor ini belum dikelola secara optimal. Salah satu solusi yang diajukan adalah dengan memfokuskan investasi pada sektor-sektor tersebut untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga dianggap sebagai solusi yang menjanjikan. *Rachman* (2019) menyebutkan bahwa banyak daerah di wilayah Timur yang memiliki potensi wisata alam yang sangat besar, namun belum dikelola dengan baik. Dengan mengembangkan sektor pariwisata, tidak hanya perekonomian lokal yang dapat berkembang, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas infrastruktur dan aksesibilitas antarwilayah.

Solusi lainnya yang dapat diterapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah Timur. Pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi faktor yang sangat penting dalam mengurangi ketimpangan ini. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, pemerintah dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan produktif yang dapat bersaing di pasar tenaga kerja nasional, serta mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Peran Sektor Swasta dalam Mengurangi Ketimpangan

Peran sektor swasta dalam mengurangi ketimpangan pembangunan juga sangat penting. Investasi swasta dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dan menciptakan lapangan kerja di wilayah Timur Indonesia. *Handayani* (2022) dalam studinya menyatakan bahwa sektor swasta dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam pengembangan ekonomi daerah, dengan menciptakan industri berbasis sumber daya lokal dan meningkatkan akses ke pasar yang lebih luas. Namun, untuk menarik investasi swasta ke wilayah Timur, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung, seperti memberikan insentif pajak dan menyederhanakan peraturan yang ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali faktor penyebab ketimpangan serta solusi ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengurangi kesenjangan tersebut. Penelitian ini berfokus pada kajian literatur yang relevan

dan wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang memiliki pemahaman langsung mengenai isu ketimpangan pembangunan.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat pemerintah yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, ekonom yang memahami dinamika perekonomian Indonesia, serta pelaku sektor swasta yang berinvestasi di wilayah Timur. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan langsung mengenai kebijakan pembangunan yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta solusi-solusi yang dapat dipertimbangkan. Data sekunder dikumpulkan dari kajian pustaka, termasuk jurnal, laporan pemerintah, dan publikasi terkait yang membahas ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik tematik, yang melibatkan pengelompokan data berdasarkan tema utama, seperti faktor penyebab ketimpangan, kebijakan pembangunan, serta solusi ekonomi yang diusulkan. Data yang diperoleh dari wawancara dan kajian pustaka kemudian dibandingkan dan ditafsirkan untuk menemukan solusi yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut. Teknik triangulasi diterapkan untuk memverifikasi validitas dan kredibilitas data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Batasan penelitian ini adalah fokus pada ketimpangan pembangunan dari perspektif ekonomi, khususnya kebijakan pembangunan, distribusi anggaran, dan pengelolaan sektor ekonomi lokal, tanpa membahas aspek sosial dan budaya secara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketimpangan Pembangunan di Indonesia: Faktor Penyebabnya

Ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia masih menjadi isu utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat perbedaan signifikan dalam kontribusi wilayah Barat dan Timur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Wilayah Barat, terutama Pulau Jawa, menyumbang lebih dari 60% PDB nasional, sementara wilayah Timur hanya sekitar 20%. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor distribusi anggaran yang tidak merata, dengan sebagian besar dana pembangunan dialokasikan untuk wilayah Barat.

Faktor geografis menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan wilayah Timur. Wilayah Timur, yang terdiri dari banyak pulau dan daerah terpencil, memiliki keterbatasan akses infrastruktur yang menyebabkan tingginya biaya logistik dan keterlambatan dalam distribusi barang dan jasa. Hal ini memperburuk ketimpangan karena memperlambat laju pertumbuhan ekonomi dan membatasi peluang investasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan

dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penting yang menyebabkan ketimpangan ini semakin dalam.

Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Ketimpangan

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur. Salah satu kebijakan utama adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disalurkan ke daerah-daerah tertinggal, terutama di wilayah Timur. Program ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas pendidikan serta kesehatan.

Namun, meskipun kebijakan tersebut memberikan dampak positif dalam beberapa daerah, hasilnya masih terbatas. Banyak daerah di wilayah Timur yang menghadapi tantangan dalam hal kapasitas pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan. Selain itu, pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana DAK juga sering kali menjadi masalah yang menghambat efektivitas program tersebut.

Sumber Daya Alam sebagai Solusi Pembangunan

Wilayah Timur Indonesia kaya akan sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil pertanian, perikanan, dan tambang. Potensi ini belum dikelola secara optimal. *Fitriani* (2021) menyarankan bahwa pengelolaan sumber daya alam di wilayah Timur dapat menjadi solusi utama dalam mengurangi ketimpangan. Dengan pendekatan yang berbasis pada pengelolaan sumber daya lokal, seperti industri perikanan dan pertanian yang lebih efisien, dapat menciptakan peluang ekonomi baru dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan sektor pariwisata juga berpotensi besar. Banyak daerah di wilayah Timur Indonesia memiliki keindahan alam yang belum dikelola dengan baik. Peningkatan sektor pariwisata dapat membantu memperbaiki kualitas infrastruktur dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal. Misalnya, pengembangan pariwisata di Raja Ampat, Papua, yang dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, telah mendatangkan keuntungan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah.

Peran Sektor Swasta dalam Mengurangi Ketimpangan

Sektor swasta memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pembangunan. Investasi swasta di sektor-sektor strategis, seperti pertanian, energi terbarukan, dan pariwisata, dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, sektor swasta juga dapat membantu meningkatkan kualitas infrastruktur dengan berinvestasi dalam pembangunan jalan, pelabuhan, dan fasilitas lainnya.

Namun, sektor swasta juga menghadapi tantangan dalam berinvestasi di wilayah Timur. *Handayani* (2022) menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah ketidakpastian kebijakan, seperti perizinan yang rumit dan infrastruktur yang belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung sektor swasta untuk berinvestasi di wilayah Timur, seperti insentif pajak dan kemudahan perizinan.

Solusi Ekonomi untuk Mengurangi Ketimpangan

Berdasarkan temuan di atas, beberapa solusi ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia antara lain:

a) Optimalisasi Potensi Sumber Daya Alam

Manfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayah Timur, seperti pertanian, perikanan, dan energi terbarukan, untuk meningkatkan perekonomian daerah. Pengelolaan yang lebih efisien dan berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

b) Peningkatan Infrastruktur

Mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, terutama transportasi, energi, dan komunikasi, agar dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan koneksi antarwilayah.

c) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan di wilayah Timur agar dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif dan mampu bersaing di pasar nasional dan global.

d) Dukungan untuk Sektor Swasta

Memberikan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi di wilayah Timur dengan mempermudah perizinan dan memberikan insentif pajak. Hal ini dapat mendorong sektor swasta untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi daerah.

Ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan yang terpusat, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya kualitas SDM di wilayah Timur. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan tersebut, hasilnya masih terbatas. Oleh karena itu, solusi ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan sektor swasta, dan peningkatan infrastruktur serta kualitas SDM dapat menjadi langkah-langkah yang efektif untuk mengurangi ketimpangan dan mencapai pembangunan yang lebih merata di Indonesia.

KESIMPULAN

Ketimpangan pembangunan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia merupakan masalah struktural yang telah berlangsung lama dan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional. Perbedaan signifikan dalam kontribusi ekonomi, kualitas infrastruktur, dan akses terhadap layanan dasar antara kedua wilayah ini menciptakan kesenjangan yang menghambat pemerataan kesejahteraan masyarakat. Wilayah Barat, khususnya Pulau Jawa, lebih maju dalam berbagai sektor, sementara wilayah Timur, meskipun kaya akan sumber daya alam, masih tertinggal dalam hal infrastruktur dan pengelolaan ekonomi.

Penyebab utama ketimpangan ini antara lain adalah kebijakan pembangunan yang terpusat di wilayah Barat, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya investasi di wilayah Timur. Selain itu, faktor geografis dan demografis yang kompleks juga mempengaruhi keterlambatan pembangunan di wilayah Timur. Meskipun pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi ketimpangan, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Otonomi Daerah, hasil yang dicapai masih belum optimal.

Solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara kedua wilayah ini meliputi optimalisasi potensi sumber daya alam di wilayah Timur, peningkatan kualitas infrastruktur, serta pemberdayaan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor pariwisata dan pengelolaan yang lebih efisien terhadap sumber daya alam juga dapat menjadi kunci utama untuk mempercepat pembangunan di wilayah Timur.

Secara keseluruhan, untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh Indonesia, dibutuhkan kebijakan yang lebih terfokus pada pemberdayaan daerah-daerah tertinggal, pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan yang tepat, ketimpangan pembangunan dapat dikurangi, sehingga Indonesia dapat mencapai kesejahteraan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Darmawan, N. A. S., & Sinarwati, N. K. (2014). Analisis strategi peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 9(2), 1-8.
- Agoes, S., & Ardiana, C. (2014). *Etika Bisnis dan Profesi*. Salemba Empat.
- Ahmad, R. (2017). Reformasi Kebijakan Ekonomi untuk Pengurangan Ketimpangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 23(4), 102-120.
- Ajrina, K. I., & Ridwan, R. (2019). Pengaruh pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Tanjungpinang. *Jurnal Akrab Juara*, 4(3), 54-68.
- Amiruddin, Z. (2021). Peran Pemerintah dalam Menangani Ketimpangan Wilayah. *Jurnal Administrasi Negara*, 18(2), 25-40.

- Anwar, M., & Fadillah, R. (2020). Penyebab dan Solusi Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 22(1), 45-60.
- Arifin, Z., & Rina, S. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerataan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan*, 17(3), 88-101.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Statistik Pembangunan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Bakri, A., & Fitriani, M. (2019). Dampak Ketimpangan Pembangunan Terhadap Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(2), 63-75.
- Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Indonesia: Evaluasi Ketimpangan Wilayah*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Basri, R. (2016). Meningkatkan Investasi untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Investasi*, 11(1), 23-39.
- Darmanto, E. (2021). Tantangan Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Infrastruktur dan Pembangunan*, 13(3), 50-65.
- Dewi, R. S. (2020). Analisis Kebijakan Otonomi Daerah dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal Pemerintahan*, 17(4), 102-115.
- Fikri, M. A. (2021). Pembangunan Ekonomi yang Merata: Solusi Ketimpangan antara Wilayah Barat dan Timur. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 20(2), 71-84.
- Fitriyani, R. (2021). Analisis Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(2), 44-59.
- Handayani, R. (2022). Peran Sektor Swasta dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(4), 78-89.
- Hassan, R. (2019). Pengaruh Etika Profesi dan Independensi Auditor Terhadap Pendekripsi Fraud dengan Profesionalisme Auditor sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1-28.
- Hidayat, A., & Putra, F. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 28(1), 31-45.
- Ilham, M. (2021). Solusi Pengembangan Ekonomi Lokal untuk Menanggulangi Ketimpangan. *Jurnal Ekonomi Lokal*, 10(2), 12-22.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Lestari, D. (2020). Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Wilayah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 22(1), 12-21.
- Maf, Z. (2018). Strategi Pembangunan Ekonomi untuk Mengurangi Ketimpangan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(3), 100-115.
- Maulana, F., & Suryani, L. (2020). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Mengatasi Ketimpangan Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Sumber Daya Alam*, 15(2), 80-95.
- Purnama, E. (2017). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 25(1), 32-45.

- Rachman, R. (2019). Peningkatan Sektor Pariwisata sebagai Solusi Pembangunan Daerah Timur Indonesia. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 14(2), 77-85.
- Sulaiman, M. (2020). Ketimpangan Pembangunan di Indonesia: Faktor dan Solusinya. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Sutrisno, J. (2019). Analisis Pembangunan Ekonomi di Wilayah Timur Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Abadi.
- Syafi'i, A., & Irwan, D. (2020). Peran Infrastruktur dalam Meningkatkan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia. *Jurnal Infrastruktur*, 12(3), 51-62.
- Todaro, M. P. (2000). Pembangunan Ekonomi: Masalah, Kebijakan, dan Strategi. Jakarta: Erlangga.
- Wallerstein, I. (1974). *The Modern World System*. New York: Academic Press.

